

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- A. Sukmara dkk, 2002, *Panduan Pemantauan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat dengan Metode Manta Tow*, Departemen Kelautan dan Perikanan & Coastal Resources Center University of Rhode Island, Jakarta.
- Bakosurtanal, 2003, *Inventarisasi Data Dasar Survei Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut, Sumberdaya Terumbu Karang Kepulauan Kangean*, Pusat Survei Sumberdaya Alam Laut, Cibinong.
- D.G. Bengen, 2002, *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*, PKSPL- IPB, Bogor.
- E.D. Gomez, dan H.T. Yap, 1984, *Monitoring Reef Condition. In: Coral Reef Management Handbook*, R.A. Kenchington and B.E.T. Hudson (Eds). Unesco Publisher, Jakarta.
- Ian Craib, 1994, *Teori-Teori Sosial Modern Dari Parsons Sampai Habesmas*, Rajawali pers, Jakarta.
- I. Ramli, 2003, *Analisis Kebijakan Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah, Program*, Magister Ilmu Lingkungan, UNDIP, Semarang.
- Laica Marzuki, 1995, *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis*, Hasanuddin University Pres, Makasar.
- L. Burke, 2002, *Terumbu Karang Yang Terancam Di Asia Tenggara (Ringkasan untuk Indonesia)*, World Resources Institute, Amerika Serikat.
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Notoatmodjo, 2007, *Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan*, Medika Press, Jakarta.
- .Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

- R. Dahuri, 2003, *Keanekaragaman Hayati Laut*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Richard A. Dixon, 2018, *Produksi Phytoalexin oleh Kultur Jaringan*, Universitas Texas, Amerika Serikat.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Silviana Timotius, 2005, *Laporan Pengamatan Jangka Panjang Terumbu Karang Kepulauan Seribu*, The David Lucile Packard Foundation, Jakarta
- Selo Soemardjan, 1988, *Masyarakat dan Kebudayaan*, Djambatan Pres, Jakarta.
- Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberti, Yogyakarta.
- Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsono, 1996, *Jenis-Jenis Karang Yang Umum Dijumpai di Perairan Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Suko Bandiyono, 2007, *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II Desa Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai*, LIPI, Jakarta.
- Supriharyono, 2000, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Westmacott S. dan dkk, 2000, *Pengelolaan Terumbu Karang Yang Telah Memutih dan Rusak Kritis*, Diterjemahkan oleh Jan Hanning Steffen IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, Inggris Information Press, Oxford.

Zainudin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Garifika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2014 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-20138.

C. Jurnal

Harfiandri Damanhuri, 2003, "Terumbu Karang Kita", *Jurnal Mangrove dan Pesisir*, Vol.III No.2/2003

D. Sumber Lainnya

Comemap LIPI dan Posteri 1 Sumatera, 2001, *Kajian Biofisik Terumbu Karang di Kabupaten Kepulauan Mentawai*, Arsip Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Mentawai, Mentawai.

Yayasan Minang Bahari, 2002, *Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Masyarakat oleh NGO program Coremap II Kabupaten Kepulauan Mentawai*, YMB, Padang.

Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Posteri 1 Sumatera, 2004, *Penelitian Biofisik Terumbu Karang di Pulau-Pulau Kecil di Kabuapten Kepulauan Mentawai*. Arsip Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, mentawai

Bates, 2012, *Pengertian Pengetahuan Menurut Para Ahli*, <https://jagad.id>.

Aziz Salam, 2013, *Kerusakan Karang di Perairan Pantai Molotabu Provinsi Gorontalo*, *Jurnal Perikanan dan kelautan*.

Arsip Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019

[https://dkp.pemprovsumbar, go.id](https://dkp.pemprovsumbar.go.id). 2018, *Arah Baru Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat*.